

Desa Adat Wajib *Perarem* kan Kelola Sampah



● IST
Kepala Dinas Kebudayaan Badung, I Gede Sukadana

Kalau ada desa adat yang belum membuat *perarem* terkait pengelolaan sampah, konsekuensinya BKK dari Provinsi Bali bisa ditunda.

MANGUPURA, NusaBali
Peran desa adat di Kabupaten Badung kini diperkuat dalam gerakan penanganan sampah. Sebanyak 124 desa adat di Gumi Keris diwajibkan memiliki *perarem* (aturan adat) tentang pengelola-

an sampah berbasis sumber yang mengikat seluruh pihak, termasuk pendatang, dengan ancaman sanksi administratif bagi pelanggaran yang kedapatan membuang sampah sembarangan.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gede Sukadana, mengatakan aturan ini merupakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk melibatkan desa adat dalam penanganan sampah dari sumbernya. Aturan pengelolaan sampah yang dituangkan dalam *perarem* berlaku bagi seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah desa adatnya masing-masing.
"Semua elemen berlaku, baik krama desa adat, krama *tamui* maupun *tamui*, karena berkaitan dengan penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah

di desa adat masing-masing," ujar-nya, dikonfirmasi Rabu (10/6).
Dia menambahkan, desa adat yang belum membuat *perarem* pengelolaan sampah bahkan bisa terancam mengalami penundaan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali.
"Kalau ada desa adat yang belum membuat *perarem* terkait pengelolaan sampah, konsekuensinya BKK bisa ditunda. Ini menjadi pemantik agar desa adat semakin bersemangat dan mempercepat penyusunan aturan pengelolaan sampah," katanya.
Birokrat asal Petang itu memas-tikan, seluruh desa adat di Badung sudah bergerak menyusun dan menjalankan *perarem* tersebut. Pengawasan dilakukan bersama secara kolaboratif antara desa

dinas dan desa adat dengan meli-batkan berbagai unsur. Dia menilai, kerja sama ini penting karena desa adat juga berperan dalam kegiatan keagamaan yang berpotensi meng-hasilkan sampah upakara.
"Pengawasannya dilakukan ber-sama. Ada Babinsa, Bhabin-kantib-mas, perangkat desa dinas, prajuru desa adat hingga pecalang yang ikut melakukan pengawasan," jelas Sukadana.
Untuk mendukung implemen-tasi *perarem*, desa adat diminta menyediakan fasilitas pengelo-laan sampah sesuai kebutuhan, seperti tong komposter hingga teba modern. Selain itu, para pemedek diimbau bertanggung jawab terhadap sampah sisa persembahyangan yang dibawa saat bersembahyang.
"Biasanya setelah persembah-

yan, pengenter pemuspaan mengingatkan pemedek agar sampah atau sisa sarana persem-bahyangan ditempatkan pada lokasi yang sudah disediakan," kata mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung itu.
Meski perangkat aturan dan sanksi administratif telah terse-dia, penerapannya saat ini masih mengedepankan pendekatan per-suasif. Desa adat bersama unsur terkait masih memprioritaskan pembinaan karena kesadaran ma-syarakat dalam mengelola sampah dinilai terus meningkat.
"Untuk saat ini baru sebatas teguran, terutama teguran lisan. Belum sampai pada penerapan san-ksi sosial karena masyarakat sudah mulai menunjukkan kepatuhan yang lebih baik," tandasnya. ☞ **dar**

Gelar *Stress Test Workshop* di Tanjung Benoa Peneliti Lintas Negara Kaji Kesiapsiagaan Bencana

MANGUPURA, NusaBali
Peneliti dari Indonesia, Inggris, dan Kanada meng-gelar *Stress Test Workshop* di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Rabu (10/6). Kegiatan ini bertujuan mengkaji dan memperkuat ketangguhan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana melai-lui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyara-kat, pemerintah, dan pe-mangku kepentingan.

Workshop tersebut me-rupakan kolaborasi antara Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), University of Bristol, Western University of Canada, University College London (UCL) Inggris, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tanjung Benoa.

Peserta mengikuti dialog partisipatif bertema "Skenario Ketangguhan Meng-hadapi Bencana". Diskusi membahas berbagai skenario dan kesiapan sistem yang dimiliki Tanjung Benoa dalam kondisi darurat.

Peneliti Utama Bersama Tim Indone-sia, Dr Mohammad Farid, menjelaskan *stress test* adalah metode untuk menguji keandalan sistem saat menghadapi kon-disi darurat. Cara ini digunakan untuk melihat kekuatan dan kekurangan yang masih perlu diperkuat dalam sistem kesiapsiagaan masyarakat.

"Melalui workshop ini kami men-co-ba mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah, profesional,



● NUSABALI/RIKHA SETYA
Peserta mengikuti Stress Test Workshop di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Rabu (10/6).

dan masyarakat, kami ingin melihat ba-gaimana sistem yang ada dapat semakin diperkuat, baik dari sisi peringatan dini, koordinasi maupun respons kebencana-an," ujar Farid.

Dia mengatakan, Tanjung Benoa dipilih karena sudah berstatus *Tsunami Ready Community* dari UNESCO-IOC. Kawasan ini dinilai tepat untuk kajian ketangguhan bencana.

Menurutnya, kesiapsiagaan Tanjung Benoa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya titik-titik evakuasi tsunami dan meningkatnya pemahaman ma-syarakat terhadap mitigasi bencana. Namun, kesiapsiagaan perlu terus diperkuat.

"Kalau menurut kami, Tanjung Benoa sebenarnya sudah sangat siap. Banyak titik evakuasi tsunami yang sudah tersedia dan masyarakat juga cukup memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun kesiap-siagaan itu harus terus dipertahankan dan diperkuat," katanya.

Sementara itu, Ketua FPRB Tanjung Benoa, I Wayan Deddy Sumantra, menyambut baik kegi-atan ini. Menurutnya, work-shop memberi wawasan baru tentang berbagai skenario bencana, tidak hanya tsunami, tetapi juga banjir rob dan be-naca pesisir lain.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat karena tidak hanya membahas ba-gaimana menghadapi be-naca saat terjadi, tetapi juga strategi penanganan dan pemulihan pascabencana," ucap Deddy.

Dia menambahkan, Tanjung Benoa kini tidak hanya dikenal sebagai desti-nasi wisata bahari, tetapi juga berkem-bang sebagai kawasan edukasi mitigasi bencana.

Menurut Deddy, *Stress Test Workshop* ini menjadi lanjutan dari *Asset Mapping Workshop* pada 2025. Kegi-atan sebelumnya memetakan aset dan potensi lokal untuk mitigasi bencana, termasuk penggunaan kulkul sebagai sistem peringatan dini tsunami berbasis kearifan lokal.

Hasil dan rekomendasi dari work-shop ini akan dibahas oleh FPRB Tanjung Benoa dan dilatih kepada masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan wi-layah pesisir.

"Harapannya berbagai skenario yang dihasilkan dalam workshop ini dapat diterapkan langsung oleh masyarakat sehingga kesiapsiagaan terhadap be-naca semakin kuat," kata Deddy. ☞ **ris**

Buat Gaduh di Bandara

WN Arab Saudi Terancam Dideportasi



● IST
Petugas Satpol PP Badung bersama pihak pengamanan bandara mengamankan seorang WNA Arab Saudi di kawasan Bandara Ngurah Rai, Kuta, Rabu (10/6).

MANGUPURA, NusaBali

Seorang WNA asal Arab Saudi diduga membuat kegaduhan di Ban-dara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Rabu (10/6). Perempuan berinisial AMAS itu diamankan petugas Satpol PP Badung dan direkomendasikan untuk dideportasi karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di area bandara.

Seizin Kasatpol PP Badung, Kepala Seksi Operasional Satpol PP Badung, Made Astika Jaya mengatakan penan-ganan bermula dari laporan pihak ke-amanan bandara terkait seorang WNA yang membuat keributan.

Menurut Astika, kejadian tersebut sempat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Pihak keamanan ban-dara lebih dahulu mengamankan yang bersangkutan sebelum berkoordinasi dengan Satpol PP Pariwisata Badung.
"Berdasarkan laporan dari pihak

keamanan bandara, yang bersangkutan membuat kegaduhan dan mengganggu ketertiban di kawasan bandara," ujar Astika, dikonfirmasi Rabu siang.

Lanjutnya, laporan diterima sekitar pukul 01.00 WITA. Namun, penanganan dilakukan pada Rabu pagi setelah pergan-tian petugas piket. Satpol PP mendatangi Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 10.00 WITA untuk melakukan penanganan. Setelah diberikan pendekatan persuasif, WNA tersebut akhirnya bersedia menja-lani pemeriksaan lebih lanjut.

"Awalnya yang bersangkutan tidak mau meninggalkan area bandara. Sete-lah diberikan pemahaman dan dibujuk secara baik-baik akhirnya mau diajak untuk penanganan lebih lanjut," kata Astika.

Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, AMAS diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk pemeriksaan dan pembuatan berita

acara pemeriksaan (BAP).

Hasil koordinasi dengan Imigrasi Ngurah Rai menunjukkan AMAS telah melewati masa izin tinggal atau *overstay*. Selain itu, dia mengaku mengalami kesulitan keuangan karena tidak memi-liki uang dan kartu perbankannya tidak dapat digunakan.

"Informasi sementara yang kami peroleh, yang bersangkutan mengalami *overstay* dan mengaku tidak memiliki uang. Kartu yang dimiliki juga disebut tidak bisa digunakan," terangnya.

Atas kondisi tersebut, Satpol PP Badung kemudian mengirim surat rekomendasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai agar yang bersangkutan dideportasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi itu juga didasarkan pada dugaan pelanggaran Pidara Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam surat yang dikirimkan Satpol PP Badung tersebut, AMAS diduga melanggar Pasal 17 ayat (1) terkait perbuatan yang mengganggu ke-tenteraman orang lain serta ketentuan mengenai gelandangan dan pengemis.

Keberadaan WNA tersebut di area parkir Bandara Ngurah Rai juga di-nilai menciptakan kondisi yang tidak kondusif dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Saat ini AMAS masih dalam penanganan Imigrasi Ngurah Rai untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai kewenangan instansi tersebut.

"Kami merekomendasikan deportasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta agar tidak menjadi contoh bagi WNA lainnya," tegas Astika. ☞ **ris**

9 Anak Punk Huni Rumah Kosong ★ Dijemput Satpol PP, Diserahkan ke Dinsos



● IST
Satpol PP Badung mendata sembilan anak punk yang menempati rumah kosong di kawasan Simpang Imam Bonjol, Rabu (10/6).

MANGUPURA, NusaBali

Keberadaan anak punk yang me-nempati rumah kosong terbengkalai di kawasan Simpang Imam Bonjol-Sunset Road ditertibkan. Meski sudah diminta meninggalkan lokasi sehari sebelumnya, namun sekelompok anak punk tetap bertahan di rumah kosong yang terletak di perbatasan Badung-Den-pasar itu.

Ditambah lagi, saat didatangi ke-mbali, petugas menemukan penghuni rumah itu justru menjadi sembilan orang. Akhirnya, Satpol PP Kabupaten Badung menjemput sembilan anak punk tersebut pada Rabu (10/6) pagi dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.

Kegiatan penertiban melibatkan personel Satpol PP Badung, Pecalang Banjar Abianbase, dan Kepala Lingkungan Abianbase. Penertiban dilakukan setelah Satpol PP menerima laporan warga tentang keberadaan sekelompok anak jalanan yang menja-dikan rumah kosong tersebut sebagai tempat tinggal sementara.

Seizin Kasatpol PP Badung, Kepala Seksi Operasional Satpol PP Badung, Made Astika Jaya, mengatakan petugas lebih dulu melakukan patroli dan pe-nelusuran lokasi. Setelah itu, petugas mendata dan memeriksa identitas penghuni rumah.

"Total ada sembilan orang yang berhasil kami jumpai dari lokasi. Kon-disi berlangsung tertib dan tidak ada perlawanan. Selanjutnya mereka kami

serahkan ke Dinas Sosial untuk pem-binaan sesuai prosedur," ujar Astika, dihubungi Rabu siang.

Sementara itu, Danru Satpol PP BKO Kecamatan Kuta, I Wayan Suan-tara, menjelaskan keberadaan anak jalanan di rumah kosong itu sebenarnya sudah diketahui sejak sehari sebelumnya, Selasa (9/6). Saat itu, petugas sedang menelusuri keberadaan anak jalanan yang kerap mengamen dan berkumpul di sekitar Simpang Imam Bonjol.

Dalam penelusuran tersebut, petu-gas menemukan rumah kosong yang dipenuhi semak dan diduga sudah lama tidak dihuni. Rumah itu ternyata dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat oleh sejumlah anak jalanan.

"Ketika kami lakukan pengecekan pertama, ditemukan empat orang di dalam area rumah. Ada yang sedang membakar ayam di halaman dan ada juga yang sedang tidur di dalam ba-ngunan," kata Suan-tara.

Saat dimintai keterangan, keempat anak jalanan itu mengaku berasal dari Jawa Barat. Namun, sebagian tidak bisa menunjukkan identitas diri. Me-reka berdalih hanya singah sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke Lombok.

Dari temuan tersebut, petugas kemudian berkoordinasi dengan pe-rangkat lingkungan setempat untuk mengetahui status rumah itu. Hasil penelusuran menunjukkan rumah itu sedang dalam status sengketa dan sudah lama terbengkalai.

"Pihak yang selama ini dipercaya mengurus rumah itu juga mengaku ter-kejut mengetahui bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh anak-anak jalanan," terangnya.

Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP meminta pengelola menutup akses masuk ke rumah agar tidak kembali digunakan tanpa izin. Saat pengecekan pertama, anak jalanan itu juga sudah diberi pembinaan dan diminta mening-galkan lokasi.

Namun, saat pengecekan ulang pada Rabu pagi bersama kepala lingkungan dan Pecalang Banjar Abianbase, pe-tugas menemukan jumlah penghuni rumah justru bertambah menjadi sembilan orang.

Petugas kemudian memeriksa selu-ruh penghuni rumah. Hasilnya, tidak di-temukan senjata tajam maupun barang berbahaya lainnya. Sebagian memiliki identitas diri, sedangkan sebagian lain-nya tidak dapat menunjukkan.

"Tidak ada perlawanan, mereka san-gat kooperatif. Sesuai SOP, seluruhnya kami bawa ke Dinas Sosial untuk men-dapatkan pembinaan," kata Suan-tara.

Menurutnya, alasan para remaja itu tetap bertahan di lokasi karena meng-aku masih mengumpulkan uang dari hasil mengamen.

"Alasannya masih sama seperti yang sering kami dengar selama ini. Mereka mengaku sedang mengumpulkan uang untuk menyeberang ke Lombok. Namun alasan itu sudah berulang kali disampaikan," sebutnya. ☞ **ris**

Wabup Bagus Alit Sucipta Hadiri Upacara Ngeratep Tapakan di Pura Dalem Bebalang Carangsari



● PROKOMPIN SETDA BADUNG
Wabup Bagus Alit Sucipta saat menghadiri Upacara Ngeratep Tapakan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Badung, Rabu (10/6).

MANGUPURA, NusaBali

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri Upacara Ngeratep Tapakan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Badung, pada rahina Buda Pon Sungsang, Rabu (10/6). Sebagai bentuk nyata dukungan dan apresiasi, Pemerintah Kabupaten Badung me-nyerahkan bantuan dana hibah secara simbolis sebesar Rp 700 juta untuk proses Ngodakin Tapakan.

Upacara ini dipuput oleh Ida Pedanda Gede Manuaba dari Griya Gede Carang-sari. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara dan I Nyoman Artawa,

Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana, Camat Petang AA Ngurah Darna Putra, Tripika Kecamatan Petang, Perbekel Desa Carangsari I Made Sudana, Perbekel Desa Petang Dewa Gede Usadi, serta para tokoh adat dan penglingsir Puri Agung Carangsari.

Dalam sambrama wacananya, Wabup Alit Sucipta menyampaikan apresia-si mendalam kepada *krama* (warga) Desa Adat Carangsari atas semangat gotong-royong dalam melaksanakan pujawali ini. Menurutnya, perbaikan (ngodakan) Pelawatan Ida Betara Ba-rong ini menjadi simbol persatuan dan ketulusan bakti masyarakat.

"Kehadiran pemerintah di tengah

masyarakat tidak lain adalah untuk meringankan beban krama. Kami ber-harap kebersamaan dan semangat gotong-royong ini terus dijaga demi kelancaran upacara (sida purna, sida sidaning don)," ujarnya.

Sementara itu, Manggala Karya, I Gusti Ngurah Mudra, menjelaskan bahwa Pura Dalem Bebalang kini berstatus sebagai Pura Kahyangan Tiga yang diempon oleh tiga banjar, yaitu Banjar Pemijian, Banjar Bedauh, dan Banjar Mekarsari. Total pengempon terdiri dari 96 pengempon pokok dan 326 pengempon kapekan.

Dia menambahkan, keputusan untuk melakukan upacara ngodakan ini lahir dari hasil musyawarah warga pada 17 Desember 2025 lalu. Proses perbaikan Pelawatan Ida Betara melibatkan un-dagi (arsitek tradisional) dan sangging terpercaya dari wilayah Puaya dan Taro Tegalalang, Gianyar.

Adapun total biaya keseluruhan untuk proses ngodakan tersebut mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Sumber dana berasal dari hibah Pemkab Badung sebesar Rp700 juta, Pemerintah Desa Carangsari Rp 150 juta, CSR BPD Bali Rp 50 juta, urunan (*peson-peson*) pemaksan Pura Rp 437 juta, serta dana punia sukarela dari krama sebesar Rp 415 juta.

"Kami juga berterima kasih atas perhatian berkelanjutan dari Pemkab Badung, mengingat pada tahun 2024 lalu, Pura Dalem Bebalang juga telah menerima bantuan sebesar Rp 4,8 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan fisik di area (*wewidangan*) Pura," pung-kasnya. @ **dar**